



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AKBAR**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NIK : **281953**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.985.000.000**

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA SINJAI, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/6 m2 di KAB / KOTA SINJAI, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 412 m2/192 m2 di KAB / KOTA SINJAI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.220.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 6 m2/13 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 17 m2/7 m2 di KAB / KOTA SINJAI, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 350.000.000**

1. MOTOR, SUZUKI SAPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI NINJA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 378.925.000**

D. SURAT BERTAGIH **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 6.527.287**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.720.452.287

III. HUTANG

Rp. 293.289.253

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.427.163.034

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.